

Penguatan Promosi Desa Melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Desa di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan

Rural Promotion Strengthening through Capacity Building of Apparatus in Management of Village Information Systems in Buay Bahuga District Way Kanan District

**Simon Sumanjoyo Hutagalung¹, Bambang Utoyo², dan Nana Mulyana³.
Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung^{1,2,3}
Email: simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id**

Abstrak

Penerapan e-government dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Strategi tersebut didukung dengan kebijakan yang ada yaitu UU Nomor 6 Tentang Desa yang didalamnya juga memuat tentang *Website Desa*. Pasal 86 UU Desa menyebutkan Sistem informasi desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Permasalahan yang teridentifikasi khususnya pada wilayah Kecamatan Buay Bahuga adalah masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Desa (*Website Desa*). Kelompok sasaran dalam pengabdian ini yaitu aparatur desa Sekecamatan Buway Bahuga, Kabupaten Way Kanan yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan dalam pengelolaan *Website Desa* untuk pemerintah desa dengan materi yang mencakup aspek-aspek konseptual dan teknis dari *Website Desa*, sehingga diharapkan para aparatur desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat memiliki kapasitas yang lebih baik.

Kata Kunci: E-Government, Kapasitas Aparatur, Pemerintahan Desa, Promosi Desa, Website Desa.

Abstract

The application of e-government starts from a simple form of service, namely the provision of information and computer-based data about the implementation and implementation of government and development as a form of openness in the implementation of public services. This strategy is supported by existing policies, namely Law Number 6 concerning Villages which also includes Village Websites. Article 86 of the Village Law states that village information systems contain village data, village development data, village areas and other information relating to village development. The problems identified especially in the Buay Bahuga District are the low capacity of the village government apparatus in managing and utilizing the Village Management Information System (Village Website). The target group in this service is the village apparatus in the Bahuga Buway Subdistrict, Way Kanan District which includes the Village Chief, the Village Secretary. This activity is carried out through training in the management of the Village Website for the village government with material covering the conceptual and technical aspects of the Village Website, so that it is expected that village officials who participate in these activities can have better capacity.

Keywords: Apparatus Capacity, E-Government, Rural Promotion, Village Website, Village Government

PENDAHULUAN

IT atau Informasi dan Teknologi merupakan sebutan yang akrab untuk sebuah sistem yang saat ini semakin pesat perkembangannya yang menjangkau di hampir setiap lini dalam kehidupan manusia. IT adalah suatu hal yang sulit untuk dipungkiri untuk mengalami perkembangan secara signifikan. Apabila sebuah bangsa menguasai IT, tidak menutup kemungkinan bangsa tersebut akan menjadi negara maju. Dalam sebuah video yang dinyatakan oleh seorang pakar fisika di Indonesia yaitu Prof. Yohanes Surya, Ph.D. menyatakan bahwa apabila suatu bangsa ingin menjadi bangsa yang maju, maka hanya satu kuncinya, kuasai teknologi.

Kita melihat bahwa IT berkembang dan berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan manusia saat ini mulai dari kebutuhan terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, sekolah, dan keamanan hingga kepada kebutuhan tambahan lainnya. Bangsa Indonesia sendiri merupakan salah satu bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia mau tidak mau ikut terlibat dalam perkembangan IT secara global khususnya untuk kepentingan bangsa sendiri. Indonesia dalam hal ini jelas tidak mau tertinggal oleh bangsa-bangsa lainnya seperti Jepang dan Amerika yang maju dibidang IT. Penguasaan dibidang IT itulah yang menjadi sebab Jepang dan Amerika Serikat menjadi negara maju.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang merata kepada seluruh warga negaranya, sehingga senantiasa selalu memperbaiki kualitas pelayanan yang ada. Kualitas pelayanan yang baik memiliki dua asas yaitu efektif dan efisien. Kedua asas tersebut harus juga sesuai dengan kebutuhan yang mampu mengelola data dengan cepat, serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat.

Deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Masyarakat Informasi (The World Summit on the Information Society) yang diadakan pada bulan Desember 2003 juga telah melahirkan rencana aksi (plan of action) bagi negara-negara di dunia agar pada tahun 2015 setiap negara mengupayakan setiap lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit telah terhubung dengan jaringan komunikasi dan informasi, serta 50% penduduk dunia memiliki kemampuan mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. (Azwar:2013).

Sesuai dengan perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan e-government secara nasional. Penerapan e-government dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan

informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Strategi tersebut didukung dengan kebijakan yang ada yaitu UU Nomor 6 Tentang Desa yang didalamnya juga memuat tentang *Website Desa*. Pasal 86 UU Desa menyebutkan Sistem informasi desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sistem informasi desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Penerapan Sistem Informasi Desa, mengacu pada semangat UU Desa, harus dikembalikan ke tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan penetapan kewenangan lokal berskala desa yang turut diatur dalam Peraturan Daerah. Sistem informasi desa perlu mengakomodir keragaman di tingkat desa. Keragaman, dalam konteks terdekat, dapat diakomodir oleh pemerintah di tingkat Kab/Kota.

Dalam praktik pengembangan *e-government* dalam organisasi pemerintahan daerah Indonesia, tahapan perkembangan yang terjadi memang masih berbeda-beda. Ada daerah yang masih sangat ketinggalan dalam hal penggunaan teknologi informasi, bahkan ada yang hingga sekarang belum memiliki situs web. Salah satunya adalah Pada Kecamatan Buah Bahuga Kabupaten Way Kanan. Kecamatan Buay Bahuga merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kecamatan Buay Bahuga ±15.949Ha yang terdiri dari persawahan, perdagangan, perkebunan, perkarangan dan lain-lain. Kecamatan Buay Bahuga terdiri dari 9 (sembilan) kampung yang sebagian besar berada dijalur jalan provinsi yaitu Jalan Raya Mesir Ilir. Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada 28 Februari 2018 diketahui jika hampir seluruh desa pada kecamatan ini belum memiliki web desa.

Tabel 1. Web Desa Pada Kampung di Kecamatan Buay Bahuga

No	Nama Kampung	Nama Kepala Kampung	Web Desa
1	Sri Tunggal	Suherman	Tidak ada
2	Bumiharjo	Zohairi	Web tidak resmi
3	Suka Bumi	Wahriyansyah	Tidak ada
4	Suka Agung	Mujiat	Tidak ada
5	Suka Dana	Mulyono	Tidak ada
6	Punjul Agung	Riwayat	Tidak ada
7	Nuar Maju	Napoleon	Tidak ada
8	Lebung Lawe	Sutikno	Tidak ada
9	Way Agung	Musimin	Tidak ada

Sumber: Survey Pendahuluan (2018)

Dari Tabel 1 tersebut dapat disimpulkan jika belum ada satupun desa yang memiliki web desa resmi. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis dalam rangka observasi data awal di Desa Hanura, ternyata masih ada kekurangan dalam proses penerapan sistem *e-government*, seperti masih kurangnya sumber daya financial, belum meratanya kualitas sumber daya manusia dalam penerapan *e-government* di lingkup pemerintahan Desa juga menjadi satu masalah yang menjadi titik awal guna pelaksanaan kegiatan ini. Kurangnya pemahaman beberapa aparatur desa dan masyarakat tentang penggunaan *e-government* di Desa masih harus diatasi.

MASALAH

Berdasarkan analisis situasi tersebut maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: (1). Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mengelola Sistem Informasi Manajemen Desa (*Website Desa*), (2). Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Desa (*Website Desa*) guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

METODE KEGIATAN

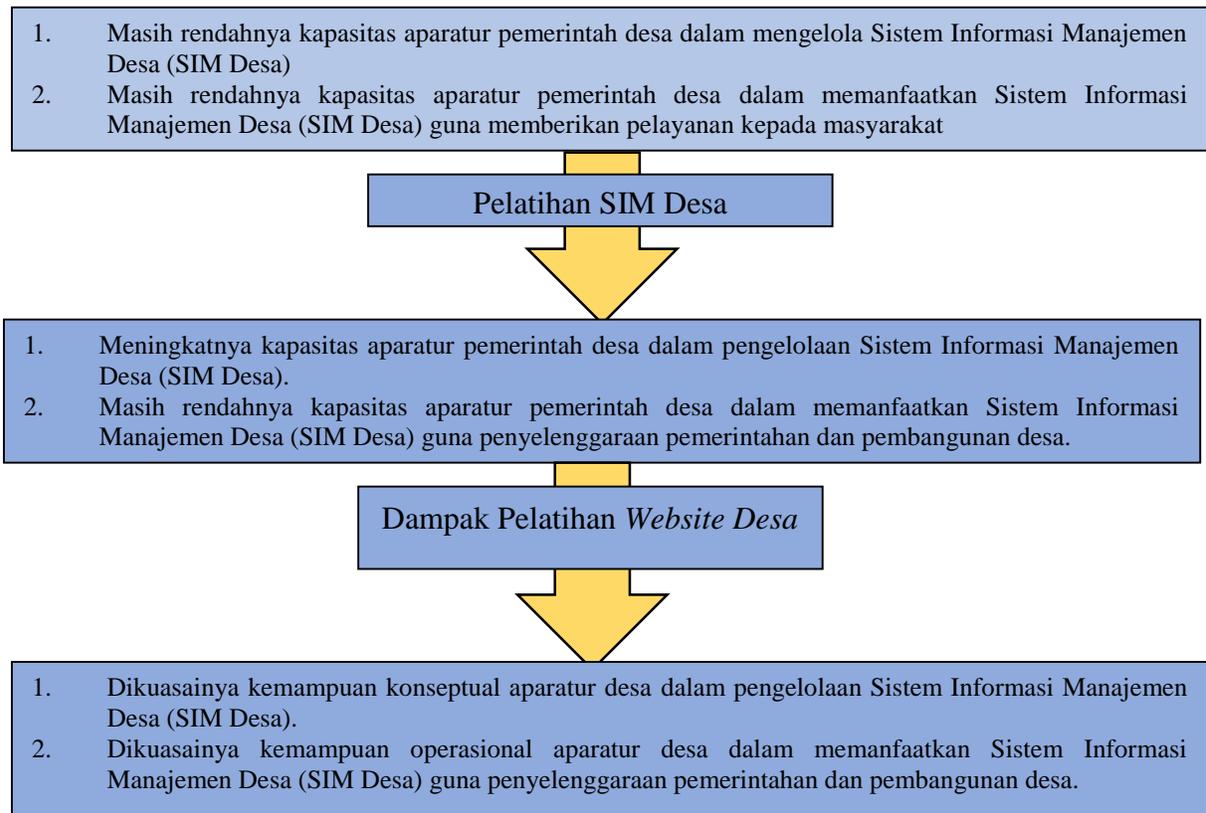
1). Cara Penyelesaian Masalah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan dalam pengelolaan *Website Desa* untuk pemerintah desa dengan materi yang mencakup aspek-aspek konseptual dan teknis dari *Website Desa*, sehingga diharapkan para aparatur desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat memiliki kapasitas yang lebih baik. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode:

1. Ceramah

2. Simulasi atau praktek
3. Diskusi kasus

Selanjutnya kerangka tersebut dapat disederhanakan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Kelompok sasaran dalam pengabdian ini yaitu aparaturn desa Sekecamatan Buway Bahuga, Kabupaten Way Kanan yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa. Berdasarkan pada cakupan di atas, maka kegiatan ini juga akan berdampak kepada beberapa pihak yang memang memiliki implikasi dengan kegiatan, yaitu:

1. Pemerintah desa Sekecamatan Buay Bahuga yang nantinya akan mengelola *Website Desa* secara mandiri.
2. Pemerintah Kecamatan Buway Bahuga yang bertindak sebagai koordinator terhadap pemerintah desa dalam implementasi *Website Desa*.

2). Teknik Evaluasi Kegiatan

Evaluasi yang dilakukan yaitu Evaluasi secara kualitatif dilakukan melalui diskusi/ tanya jawab dengan pemantauan selama proses pemaparan materi yang disajikan berlangsung antara penyaji materi dengan peserta sosialisasi, khususnya yang terkait dengan aspek yang berhubungan dengan tema kegiatan.

3). Lokasi, Waktu dan Durasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kantor Kecamatan Buay Bahuga Way Kanan dengan mengundang seluruh Kepala Desa dan Operator Desa di wilayah Kecamatan itu. Durasi kegiatan dilakukan selama 2 hari yaitu 10 dan 11 Agustus 2018. Pelaksanaan pelatihan masing-masing dilaksanakan selama 8 setiap hari.

PEMBAHASAN

Menurut (Daniel Rickett dalam Hardjanto,2006) menyebutkan “*the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission*”. Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah: (1). Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2). Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah. Menurut (Riyadi,2003) dalam sebuah artikel secara khusus menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu; (a). Komitmen bersama (Collective commitments). Menurut (Milen,2004) penguatan kapasitas membutuhkan waktu lama dan memerlukan komitmen jangka panjang dan semua pihak yang terlibat. Di dalam pembangunan kapasitas sebuah organisasi baik sektor publik maupun swasta, *collective commitments* merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen ini tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama. (b). Kepemimpinan yang kondusif (conducive Leadership). Kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas. Dengan kepemimpinan yang kondusif seperti ini, maka akan menjadi alat pemicu untuk setiap elemen dalam mengembangkan kapasitasnya. (c). Reformasi Peraturan. Dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung upaya pembangunan kapasitas

dan dilaksanakan secara konsisten. Tentu saja peraturan yang berhubungan langsung dengan kelancaran pembangunan kapasitas itu sendiri, misalnya saja peraturan adanya sistem reward dan punishment. (d). Reformasi Kelembagaan. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural. Maksudnya adalah adanya budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas. Misalnya saja dengan menciptakan hubungan kerja yang baik antar karyawan dengan karyawan lainnya atau karyawan dengan atasannya. (e). Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun program pengembangan kapasitas yang baik. Dengan adanya pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Maka kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat cepat diperbaiki dan kekuatan yang dimiliki organisasi tetap dijaga dan dipelihara.

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang memiliki manfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas atau kinerja dalam suatu organisasi. Pengertian lain mengatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh suatu organisasi maupun perusahaan untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen. Pengelolaan transaksi ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu penjelasan Sistem Informasi Manajemen juga dapat dijabarkan sebagai sistem informasi yang menghasilkan output melalui masukan input dan berbagai proses lainnya. Hasil dari proses tersebut digunakan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen organisasi atau perusahaan.

Selanjutnya pengetahuan tersebut disusun secara terstruktur dan nantinya penyampaian materi dilakukan secara panel dengan substansi penyampaian yang saling berkaitan. Berikut adalah susunan materi yang disampaikan;

Tabel 1. Distribusi Materi dan Pemateri Kegiatan

No	Materi	Pemateri	Sesi
1	Implementasi Kebijakan Pengelolaan E-Government di Desa	Simon S. Hutagalung, M.P.A	I
2	Arah Pengembangan dan Praktik Sistem Informasi Desa	Dr. Bambang Utoyo, M.Si	II
3	Kolaborasi Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government Desa	Nana Mulyana, S.I.P, M.Si	

Pada materi pertama yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan E-Government di Desa” dikemukakan oleh Bapak Simon S. Hutagalung, M.P.A tentang latar munculnya perundang-undangan yang diperuntukan bagi desa. Selain itu diutarakan juga beberapa point penting tentang administrasi desa yang kemudian menjadi bagian dari substansi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut. Setelah itu, secara paralel Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si yang menyampaikan materi tentang “Arah Pengembangan dan Praktik Sistem Informasi Desa” memberikan identifikasi point penting tentang system informasi desa dan pengelolaanya di dalam peraturan tersebut yang juga harus disikapi oleh pemerintah desa dengan melakukan pengembangan kapasitas aparatur, sehingga kemanfaatan dari kebijakan tersebut dapat secara nyata dirasakan oleh warga desa.

Pada sesi kedua, Bapak Nana Mulyana, S.I.P, M.Si menyampaikan tentang “Kolaborasi Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government Desa”, beliau memberikan identifikasi hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan E-Government Desa. Potensi positif yang dimunculkan dari UU No 6 Tahun 2014 diantaranya adalah anggaran desa akan semakin besar, oleh karena itu anggaran yang besar itu perlu di wujudkan kedalam program-program yang dapat menggerakkan kehidupan sosial ekonomi desa nantinya.

Setelah seluruh pemateri menyampaikan materinya, acara dilanjutkan dengan sesi praktik dan tanya jawab/diskusi yang dilakukan secara terpandu. Hampir sebagian besar peserta kegiatan menyampaikan pertanyaan atau meminta penjelasan lebih mendalam tentang topik E-Government Desa, termasuk dalam kaitan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang sudah pernah mereka rasakan. Pada sesi praktik dihasilkan beberapa weblog desa, contohnya sebagai berikut:



Gambar 2. Weblog Desa Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Hasil Pelatihan

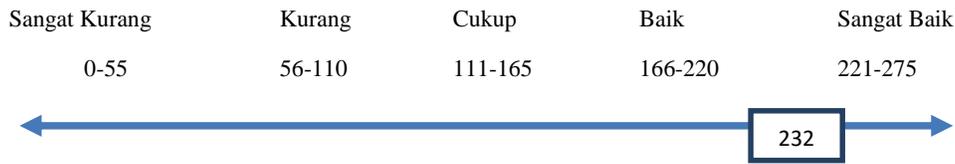
Setelah sesi tanya jawab/diskusi dilaksanakan dan dianggap telah cukup memuaskan para peserta kegiatan maka acara dilanjutkan dengan pemberian post test kepada peserta. Post test dapat dilaksanakan secara lancar dan dijalankan dengan penuh antusias. Post Test ini bermanfaat untuk melihat perubahan pengetahuan yang terjadi pada peserta kegiatan. Pada akhirnya setelah post test selesai dilaksanakan, maka kegiatan ditutup oleh Kordinator Kepala Desa dan Kordinator Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat. Dari pengamatan dan analisis skoring serta secara kualitatif maka dapat dikatakan bahwa telah lebih dikuasainya pengetahuan tentang Pengelolaan E-Government Desa oleh para anggota Aparatur Desa.

Setelah kegiatan tutorial dilakukan pada kedua sesi, dilaksanakan juga penilaian observasi terhadap keterampilan para peserta. Penilaian ini dilakukan guna mengetahui perkembangan keterampilan yang dimiliki oleh para sekretaris desa. Rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian Observasi Keterampilan Aparatur Desa

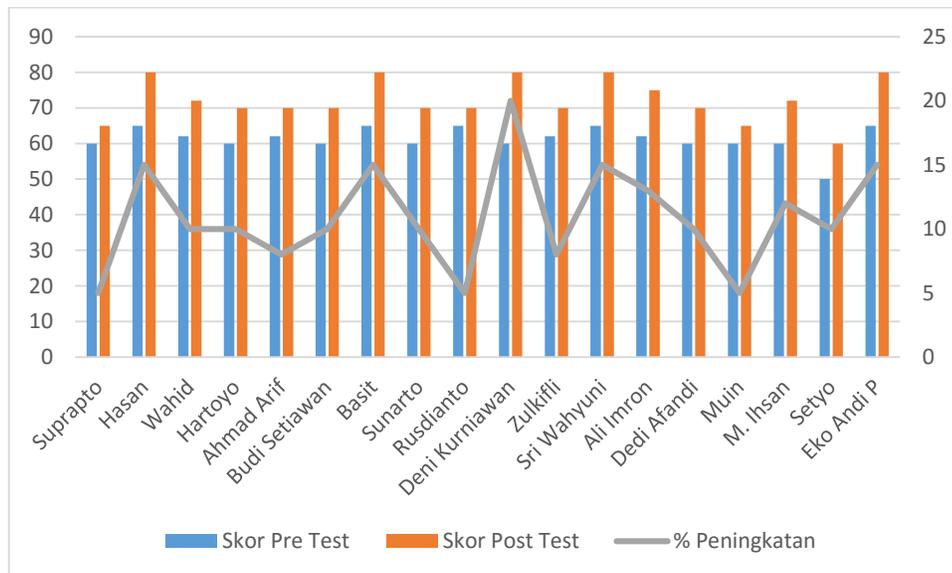
No	Proses	Hasil				
		5	4	3	2	1
	Sikap yang dinilai:	SB	B	C	K	SK
1	Persiapan alat dan bahan	8	2	1		
2	Motivasi untuk melaksanakan E-Gov	8	1	2		
3	Kedisiplinan updating konten	7	2	2		
4	Ketepatan dalam penulisan data	7	2	2		
5	Pengecekan data dokumen	8	2	1		
	Jumlah Centang	38	9	2	0	0
	Nilai	5	4	3	2	1
	Jumlah x nilai	190	36	6	0	0
	Nilai Total					232

Diketahui bahwa nilai total minimum dihasilkan dari jumlah pertanyaan dikali nilai terendah dikali jumlah responden sehingga diperoleh angka 55 sementara nilai total maksimum diperoleh dari jumlah pertanyaan dikali nilai tertinggi dikali jumlah responden sehingga diperoleh angka 275. Kemudian rentang angka 55 hingga 275 disusun menjadi lima kategori penilaian. Kategorisasi ini nantinya dapat menunjukkan posisi nilai total yang sudah diperoleh dari penilaian observasi kepada para sekretaris desa secara rata-rata. Sehingga apabila dikategorisasi berdasar 5 kriteria maka didapatkan posisi nilai total 232 berada pada kategorisasi sangat baik. Berikut adalah ilustrasi dari posisi nilai tersebut.



Gambar 2. Hasil Kategorisasi Penilaian Observasi

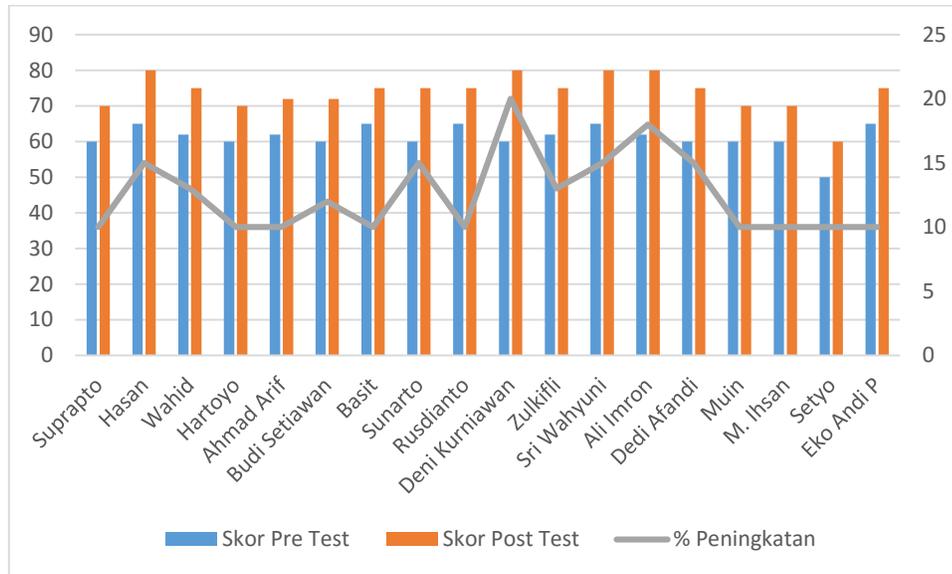
Selain itu, setelah sesi tanya jawab/diskusi dilaksanakan dan dianggap telah cukup memuaskan para peserta kegiatan maka acara dilanjutkan dengan pemberian *post test* kepada peserta. *Post test* dapat dilaksanakan secara lancar dan dijalankan dengan penuh antusias. *Post Test* ini bermanfaat untuk melihat perubahan pengetahuan yang terjadi pada peserta kegiatan. Berikut adalah daftar skoring yang membandingkan antara *pre test* dan *pro test* yang terbagi kedalam dua sesi materi, pada sesi pertama yaitu tentang administrasi asset dan kekayaan desa didapatkan grafik peningkatan yang secara rerata menunjukkan angka 10,89%. Distribusi nilai tersebut dapat dilihat dari gambar berikut;



Gambar 3. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test Sesi 1

Sementara itu, pada sesi implementasi system informasi desa terjadi juga peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tertinggi berada pada angka 20% dan peningkatan terendah pada

angka 10%, sementara secara rerata peningkatan terjadi pada angka 12,56%. Sebaran angka tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 4. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test Sesi 2

Dari pengamatan dan analisis data maka dapat dikatakan bahwa telah meningkatnya penguasaan pengetahuan tentang kolaborasi e-government desa oleh para aparatur desa yang mengikuti kegiatan tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat diketahui juga adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu. Faktor pendukung itu adalah adanya gairah dan ekspektasi dari para peserta kegiatan untuk mengikuti kegiatan itu. Sehingga adanya minat tersebut, memudahkan pemateri untuk melakukan pengembangan kapasitas pengetahuan pada masing-masing mereka.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu. Faktor pendukung itu adalah adanya gairah dan ekspektasi dari para peserta kegiatan untuk mengikuti kegiatan itu. Sehingga adanya minat tersebut, memudahkan pemateri untuk melakukan pengembangan kapasitas pengetahuan pada masing-masing mereka.

Selain itu, diketahui juga adanya faktor penghambat yang perlu diantisipasi jika hendak melaksanakan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Diantaranya adalah belum dapat dilaksanakannya kegiatan yang lebih teknis dalam bentuk tutorial kepada para peserta. Adanya

kegiatan tutorial yang lebih teknis sebenarnya dapat lebih mampu meningkatkan kemampuan praktis yang semestinya memang dimiliki oleh para aparatur desa.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kegiatan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa telah dipahaminya konsep pengelolaan e-government desa, proses dan mekanisme pengelolaan e-government desa serta pentingnya peran aktif aparatur desa dalam pengelolaan e-government desa oleh para aparatur Desa di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika telah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para Aparatur Desa dalam hal pengelolaan e-government desa sebanyak 10-20%. Oleh karena itu, metode pelatihan dalam upaya mengatasi masalah kapasitas aparatur ini sudah tepat. Setelah kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dampak penularan pengetahuan kepada kelompok sasaran di desa lainnya.

Adapun saran yang bisa diperoleh berdasarkan hasil dari kegiatan ini adalah: (a). Perlu dilakukan kegiatan pelatihan yang lebih bersifat teknis operasional serta lebih mendalam, sehingga aspek-aspek teknis yang bersifat operasional dapat dikuasainya secara lebih menyeluruh menjadi bentuk kapasitas-kapasitas yang diperlukan dalam pengelolaan layanan administrasi desa, (b).Kegiatan seperti ini perlu dilakukan pada target sasaran yang lebih luas lagi, meliputi kecamatan lain ataupun kabupaten lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Dwipayana, AAGN, Ari, dkk. 2003. Membangun *Good governance* di Desa, Yogyakarta: IRE.
- Guntur Setiawan, 2004, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harsono, Hanifah. 2002 Implementasi Kebjkn dan Politik. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, Richardus Eko. 2003. *Electronic Government* (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). eBook.
- Indrajit, Richardus Eko. 2007. *Electronic Government In Action* (Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia). eBook.

- Kumorotomo, Wahyudi. 2010. Kegagalan Penerapan *E-government* dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet. Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda karya Offset
- Nawawi, Ismail, 2009. Public Policy : Surabaya : PNM
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan public, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan *Good governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Sedarmayanti. 2007. *Good governance* (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga. Bandung : Mandar Maju
- Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrsi dan Kepemimpinan Masa Depan, Bandung: PT Refika Aditama
- Setiawan, Guntur. 2004 Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Syahriani, 2009. Implementasi Otonomi daerah dalam Perspektif *Good governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-undangan :

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permenkominfo No.05 Tahun 2015 tentang pembuatan domain desa.id



SEMNAS

IPTEK

2018



SERTIFIKAT

5181/PL15/KP/2018

diberikan kepada :

Simon Sumanjyo

Atas partisipasi aktifnya sebagai **PEMAKALAH**

Pada Seminar Nasional Penerapan IPTEK Politeknik Negeri Lampung dengan tema
"Peran Penelitian Pertanian untuk Mendukung Pengembangan Teknologi Pertanian
Berkas Sumberdaya Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat"
yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2018 di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung

Direktur,

Dr. Ir. Saroni, M.Si
NIP. 196811131992031002